



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3457-3469

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Program Bumilku dalam Pencegahan Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Kulon Progo

Pungky Elisa Nanda Tarisma^{1✉}, Nur Fitri Mutmainah²

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Email: pungkyelisa370@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Program Bumilku merupakan inovasi digital pelayanan publik dalam bentuk aplikasi e-health yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Bumilku berdasarkan lima indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dan Nurcholis, yaitu: efektivitas, sumber daya manusia, sarana prasarana, sosialisasi, dan dampak. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi Bumilku cukup efektif dalam membantu pemantauan dan rujukan kasus ibu hamil. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek keterbatasan SDM dan kurangnya sosialisasi kepada ibu hamil sebagai pengguna akhir. Program ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kematian, namun terbukti memberikan pengetahuan baru bagi tenaga kesehatan dan mendukung pengelolaan data yang lebih tertib.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Bumilku, E-Government, Kematian Ibu dan Anak, Pelayanan Publik*

Abstract

The BumilKu program is a digital innovation in public health services developed by the Kulon Progo District Health Office to reduce maternal and infant mortality rates. This study aims to evaluate the implementation of BumilKu based on five policy evaluation indicators according to Dunn and Nurcholis, namely: effectiveness, human resources, facilities and infrastructure, socialization, and impact. The study employed a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and document analysis. The results show that the BumilKu application is quite effective in assisting the monitoring and referral of pregnant women. However, challenges remain, particularly regarding limited human resources and lack of direct socialization to pregnant women as end-users. Although the program has not significantly reduced mortality rates, it has improved data management and provided new insights for health workers.

Keywords: *Policy Evaluation, Bumilku, E-Government, Maternal and Child Mortality, Public Service*

PENDAHULUAN

Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih menjadi tantangan serius dalam sektor kesehatan, baik secara nasional maupun di daerah. Di Kabupaten Kulon Progo, data sepanjang 2018–2022 menunjukkan fluktuasi dan belum adanya penurunan signifikan, menunjukkan kebutuhan akan penguatan sistem pemantauan, penanganan, dan percepatan rujukan medis. Masalah AKI dan AKB tidak hanya disebabkan oleh faktor klinis, tetapi juga karena lemahnya sistem informasi kesehatan, keterlambatan penanganan kegawatdaruratan, serta kurangnya pemantauan kehamilan secara berkala. Menurut *World Health Organization* (2016), standar mutu pelayanan maternal dan neonatal di fasilitas kesehatan harus mencakup kesiapan sistem teknologi informasi untuk mendukung identifikasi risiko dan respons darurat secara cepat dan akurat.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kesehatan meluncurkan aplikasi *BumilKu*, yaitu aplikasi pelayanan kesehatan digital berbasis teknologi informasi yang ditujukan bagi ibu hamil. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi media pemantauan kondisi kehamilan secara *real-time*, memfasilitasi klasifikasi risiko kehamilan, mempercepat proses rujukan dalam kondisi gawat darurat, dan menjadi bagian dari strategi e-government dalam pelayanan publik bidang kesehatan. Inovasi ini juga sejalan dengan semangat transformasi digital sektor kesehatan yang didorong oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan primer. Studi di Malawi yang menggunakan *artificial intelligence* untuk memantau kehamilan bahkan menunjukkan penurunan angka kematian bayi hingga 82%, yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis digital mampu mempercepat deteksi risiko dan pengambilan keputusan klinis secara tepat.

Namun, implementasi program digital kesehatan seperti *BumilKu* tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Penelitian Erawati et al. (2021) terkait aplikasi *Sayang Bunda* di Semarang menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan pengguna, rendahnya literasi digital, serta preferensi ibu hamil terhadap saluran komunikasi yang lebih privat seperti *WhatsApp*, menghambat adopsi sistem secara maksimal. Selain itu, sosialisasi yang tidak merata dan minimnya penyuluhan langsung kepada calon pengguna juga menjadi penghalang utama dalam proses implementasi. Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat literasi digital masyarakat masih bervariasi, pendekatan yang mengutamakan pendampingan interpersonal dan komunikasi partisipatif menjadi sangat penting.

Permasalahan lainnya terletak pada kesiapan sistem dan infrastruktur pendukung. Kajian *ICT maturity* yang dilakukan oleh Aisyah et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi Puskesmas di berbagai wilayah telah dimulai, tingkat kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan perangkat keras dan lunak, serta kestabilan jaringan internet masih berada pada kategori menengah ke bawah. Beberapa wilayah masih mengalami kendala teknis seperti gangguan sinyal, keterbatasan perangkat kerja, serta gangguan listrik yang berujung pada kegagalan input data. Situasi ini semakin diperparah oleh minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi tenaga kesehatan dan pengguna akhir, sehingga aplikasi tidak dapat digunakan secara optimal.

Dalam kerangka kajian *mobile health (mHealth)*, Febriani (2023) menyebutkan bahwa penggunaan *digital health tools* memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepatuhan terhadap layanan antenatal care, memperluas akses informasi kesehatan, serta memudahkan pemantauan kondisi ibu hamil. Namun, ia juga menegaskan bahwa tantangan seperti kesenjangan literasi digital, norma budaya yang menghambat penggunaan teknologi oleh perempuan, serta kesenjangan akses sosial-ekonomi, masih menjadi hambatan struktural yang harus diperhitungkan dalam proses perancangan dan evaluasi kebijakan kesehatan berbasis teknologi.

Lebih lanjut, dari sisi manajemen kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari aspek administratif dan keluaran fisik, tetapi juga dari tingkat keberterimaan pengguna serta dampaknya terhadap sasaran program. Teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn menekankan pentingnya menilai aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan program. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap aplikasi *BumilKu* menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program ini telah memenuhi indikator-indikator tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program *BumilKu* secara menyeluruh, mencakup aspek efektivitas, efisiensi pelaksanaan, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, jangkauan sosialisasi, serta dampaknya terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai keberhasilan maupun tantangan program, serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang berbasis data lapangan dan kebutuhan nyata masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa *BumilKu* tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif atau pelengkap sistem informasi, tetapi juga benar-benar menjadi media edukatif, intervensi dini, dan penguat layanan primer yang berdampak nyata dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi program *BumilKu* yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pengelola aplikasi, tenaga kesehatan, dan pihak Dinas Kesehatan, serta dokumentasi laporan dan kebijakan terkait program tersebut. Indikator evaluasi mengacu pada kerangka teori Dunn dan Nurcholis meliputi efektivitas, kualitas sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sosialisasi, dan dampak kebijakan.

Menurut Narayan (2013), pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan analisis menyeluruh terhadap konteks implementasi program, termasuk faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi penggunaan teknologi kesehatan. Hal ini diperkuat oleh Miles et al. (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan evaluasi tidak hanya bergantung pada data kuantitatif, tetapi juga narasi mendalam dari pengguna layanan—dalam hal ini ibu hamil dan tenaga kesehatan.

Dari sudut pandang kebijakan teknologi informasi, Rahayu dan Santoso (2020) menyebut bahwa evaluasi terhadap e-government seperti *BumilKu* harus mencakup aspek integrasi sistem dengan fasilitas layanan dasar, keamanan data, dan kemudahan penggunaan, karena hal ini berkaitan langsung dengan adopsi aplikasi di lapangan. Tanpa jaminan keamanan dan antarmuka yang ramah pengguna, aplikasi cenderung tidak digunakan secara maksimal.

Lebih lanjut, teori Rogers (2003) tentang difusi inovasi menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived*

usefulness) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Oleh karena itu, wawancara dengan ibu hamil harus dapat menggali bagaimana mereka menilai manfaat aplikasi dan hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses atau menerapkan fitur yang tersedia.

Dalam konteks evaluasi SDM, menurut Yuliana (2021), pelatihan dan kompetensi tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan implementasi aplikasi berbasis digital di tingkat desa dan kabupaten. Jika tenaga kesehatan tidak dilengkapi keterampilan teknis dan pemahaman terhadap aplikasi, potensi keberhasilan program merosot, meskipun teknologi sebenarnya telah disediakan.

Merujuk pada teori evaluasi kebijakan publik oleh Scriven (1995), aspek dampak kebijakan tidak hanya diukur dari indikator output (misalnya jumlah pengguna aplikasi), tetapi juga outcome jangka panjang seperti perubahan perilaku ibu hamil, peningkatan cakupan antenatal care, serta penurunan AKI/AKB sesuai tujuan awal peluncuran *BumilKu*.

Dengan demikian, penelitian evaluatif ini tidak hanya menelusuri aspek teknis dan operasional, tetapi juga menyentuh dimensi kebijakan, sosial, dan interaksi pengguna, untuk menghasilkan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang komprehensif dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Aplikasi *BumilKu* telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam memperkuat sistem pencatatan dan pemantauan kehamilan secara digital. Dengan mengintegrasikan data spasial dan melakukan klasifikasi risiko secara otomatis, aplikasi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan prioritas intervensi dengan lebih tepat sasaran. Pendekatan ini mengoptimalkan alokasi sumber daya kesehatan, sehingga ibu hamil dengan risiko tinggi dapat segera mendapatkan perhatian yang lebih intensif. Menurut *Nurcholis* (2007) Efektivitas dipahami sebagai bagian dari indikator evaluasi kebijakan publik digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan berhasil. Dengan demikian, *BumilKu* bukan hanya alat administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang mempercepat jalur komunikasi dan koordinasi antar fasilitas kesehatan.

Selain aspek teknis, *BumilKu* juga berkontribusi dalam menciptakan standar baru dalam penanganan kesehatan ibu berbasis teknologi informasi. Dengan memadukan sistem monitoring digital, klasifikasi risiko, dan mekanisme rujukan cepat, aplikasi ini menghadirkan inovasi layanan yang sesuai dengan tuntutan era digitalisasi pelayanan publik. Para pakar kebijakan kesehatan menilai bahwa inovasi semacam ini merupakan langkah maju dalam

transformasi sistem pelayanan kesehatan yang harus didukung dengan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, sosialisasi efektif kepada masyarakat, serta pembaruan regulasi yang mendorong penggunaan teknologi digital secara lebih luas dan terintegrasi.

Efektivitas aplikasi BumilKu dalam praktik lapangan dinilai positif oleh para petugas kesehatan dan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Aplikasi ini menyediakan data spasial dan klasifikasi risiko yang detail, sehingga memudahkan dalam pemantauan, pelaporan, dan pengambilan keputusan terkait kehamilan risiko tinggi. Informan menyebutkan bahwa sejak penerapan BumilKu, proses pelaporan data ibu hamil lebih teratur dan cepat. Selain itu, sistem digital ini membantu mempercepat koordinasi antar fasilitas kesehatan saat terjadi kasus kegawatdaruratan kehamilan. Beberapa catatan positif dari informan meliputi: tidak ada gangguan akses teknis, data lebih tertata dibanding sistem manual sebelumnya, dan kinerja pelayanan meningkat karena proses klasifikasi risiko menjadi otomatis. Namun, efektivitas ini masih perlu ditingkatkan dengan pelibatan pengguna akhir (ibu hamil) dan perluasan fitur edukatif.

Tabel 1. Efektivitas Aplikasi BumilKu Berdasarkan Penilaian Informan

Aspek yang Dinilai	Temuan Lapangan/Kutipan Informan
Ketersediaan Data Risiko	"Data sangat detail, kami tahu jumlah ibu hamil risiko tinggi, sedang, dan normal per Kapanewon".
Kemudahan Pengelolaan Data	"Petugas merasa entri data lebih mudah dan tertata".
Aksebilitas sistem aplikasi	"Tidak ada kendala besar dalam akses sistem berjalan baik, bisa dibuka dari fasilitas pelayanan".
Dukungan untuk keputusan Medis	"Aplikasi membantu klasifikasi cepat dan rujukan ibu hamil risiko tinggi ke Rumah Sakit".
Efektivitas terhadap kinerja	"Membantu percepatan deteksi risiko, koordinasi antar petugas lebih cepat dan jelas".

Sumber: Wawancara dan Observasi lapangan

Secara keseluruhan, *BumilKu* telah memberikan dampak positif dalam memperbaiki tata kelola data kesehatan ibu hamil dan mempercepat layanan kesehatan preventif dan kuratif. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan modern yang mengedepankan data-driven decision making dan teknologi sebagai enabler utama. Ke depan, pengembangan aplikasi ini harus diarahkan pada peningkatan kapasitas pengguna, pemantapan infrastruktur digital, serta penguatan kerja sama lintas sektor untuk

memastikan aplikasi tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga secara sosial dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Howlett, Ramesh & Perl (2009) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional, di mana SDM menjadi elemen kunci dalam membentuk kapasitas tersebut. Mereka menyatakan bahwa rendahnya kualitas SDM birokrasi dapat menjadi faktor utama kegagalan kebijakan, terutama dalam tahap implementasi. Selanjutnya Dunn (2018), dalam bukunya *Public Policy Analysis*, sumber daya manusia dalam kebijakan publik merupakan bagian dari *policy resources* yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. SDM yang berkualitas akan mampu menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan konkret, memastikan alokasi sumber daya yang efisien, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan program layanan digital seperti aplikasi *BumilKu*. Para pakar pengembangan organisasi menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan sebuah program digital sangat bergantung pada kapasitas, kompetensi, dan motivasi SDM yang mengelolanya. Pelatihan teknis yang diberikan memang menjadi fondasi penting, tetapi sering kali terdapat kesenjangan yang signifikan antara keterampilan teknis yang dibutuhkan dengan kompetensi aktual para petugas di lapangan. Hal ini menciptakan hambatan dalam pengoperasian aplikasi, terutama dalam proses penginputan data yang harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu petugas kesehatan juga menjadi faktor penyebab utama menurunnya kualitas dan konsistensi penginputan data. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya insentif dan penghargaan terhadap kinerja yang dapat memotivasi petugas untuk menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja yang menyertai adopsi teknologi baru. Transformasi tersebut membutuhkan reorientasi cara kerja, termasuk pembagian tugas yang adil antara petugas, pengaturan beban kerja yang rasional, serta penerapan sistem monitoring dan supervisi yang sistematis agar pengelolaan aplikasi berjalan optimal.

Selain itu, para ahli manajemen menyoroti pentingnya adanya program pengembangan kompetensi berkelanjutan dan pelatihan yang tidak hanya bersifat teknis

tetapi juga manajerial, sehingga SDM dapat menghadapi berbagai tantangan teknis dan operasional dengan lebih siap. Penguatan kapasitas ini juga melibatkan peningkatan soft skills seperti komunikasi efektif dan manajemen waktu, yang mendukung keberhasilan kerja sama lintas fungsi dalam pengelolaan data dan pelayanan kepada ibu hamil.

Ketersediaan SDM yang memadai dan berkualitas juga menjadi penentu keberlanjutan program. Menurut Dunn (1998) & Nurcholis (2007) digunakan sebagai dasar teori evaluasi kebijakan publik, termasuk indikator input SDM. Keduanya menyatakan bahwa kualitas pelaksanaan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kecukupan kapabilitas SDM. Dengan begitu tanpa dukungan tenaga pengelola yang handal dan termotivasi, aplikasi *BumilKu* berisiko hanya menjadi sebuah sistem administratif formal tanpa memberikan dampak nyata pada pelayanan kesehatan ibu hamil. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengelola aplikasi harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan, pemberian insentif yang adil, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi antar petugas.

Dalam pelaksanaan program BumilKu, aspek SDM menjadi tantangan utama. Meski sudah tersedia pelatihan teknis, banyak tenaga kesehatan masih kesulitan dalam pengoperasian aplikasi karena keterbatasan waktu, tingginya beban kerja, serta kurangnya penghargaan terhadap kinerja. Wawancara dengan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa "jumlah SDM belum mencukupi secara optimal. Evaluasi ini menegaskan bahwa keberhasilan aplikasi digital dalam pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan motivasi SDM yang mengelolanya". Secara keseluruhan, penguatan SDM bukan hanya soal kemampuan individu, tetapi juga soal bagaimana organisasi menciptakan ekosistem kerja yang kondusif bagi pemanfaatan teknologi digital. Organisasi harus mampu mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia dengan strategi pengelolaan aplikasi agar program layanan digital seperti *BumilKu* dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan perangkat keras dan jaringan internet merupakan prasyarat utama yang tidak dapat ditawar dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem aplikasi digital seperti *BumilKu*. Berdasarkan pendekatan teori sistem dalam pelayanan publik, teknologi hanya dapat berfungsi secara efektif jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dan handal. Ketimpangan distribusi perangkat keras, terutama komputer, tablet, serta akses

jaringan internet yang stabil, menjadi hambatan utama dalam pemerataan penggunaan aplikasi ini di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Aplikasi BumilKu Berdasarkan Temuan Lapangan

Aspek Sarana dan Prasarana	Temuan Lapangan
Ketersediaan Perangkat	Memadai di Pusat Kabupaten, kurang di beberapa daerah perbukitan
Akses Internet	Stabil disebagian besar wilayah, lemah atau tidak tersedia di lokasi terpencil
Dukungan Teknis	Belum tersedia sistem teknis darurat (helpdesk, perangkat cadangan)
Pengaruh pada kinerja	Ketimpangan infrastruktur menghambat pelaporan dan respon cepat

Sumber: Wawancara dan analisis lapangan

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa sebagian besar Puskesmas di pusat Kabupaten Kulon Progo telah memiliki fasilitas yang cukup memadai, seperti komputer, printer, dan akses internet. Dukungan dari pemerintah daerah juga dirasakan langsung oleh para petugas administrasi di Dinas Kesehatan, sehingga operasional pengelolaan data BumilKu dapat berjalan lancar. Namun, berbeda halnya dengan wilayah-wilayah terpencil yang masih menghadapi tantangan teknis seperti lemahnya jaringan internet dan keterbatasan perangkat kerja. Hal ini menyebabkan input data tidak dapat dilakukan secara real-time dan berdampak pada keterlambatan pemantauan serta pengambilan tindakan medis. Ketimpangan sarana antarwilayah menjadi salah satu isu penting yang perlu ditangani agar program BumilKu dapat berjalan merata dan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Kondisi geografis yang beragam dan beberapa wilayah yang terpencil dengan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas membuat tantangan ini semakin kompleks. Beberapa Puskesmas di daerah terpencil masih menghadapi kesulitan teknis akibat sinyal internet yang tidak stabil atau bahkan tidak tersedia sama sekali, sehingga aplikasi *BumilKu* sulit dijalankan secara real-time sesuai yang diharapkan. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang merata dan stabil, intervensi digital seperti *BumilKu* berisiko menjadi solusi parsial yang hanya efektif di wilayah dengan fasilitas memadai, meninggalkan wilayah lain yang kurang beruntung tanpa akses layanan yang setara.

Lebih jauh, ahli manajemen teknologi informasi mengingatkan pentingnya investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi kesehatan, bukan hanya pada tahap awal peluncuran aplikasi, tetapi juga dalam fase pemeliharaan dan pengembangan kapasitas. Infrastruktur yang kokoh juga harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung pengadaan, perawatan, dan peningkatan teknologi secara berkesinambungan, sehingga aplikasi *BumilKu* dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan yang dinamis dan berkembang.

Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan sarana prasarana teknologi informasi menjadi prioritas strategis agar aplikasi *BumilKu* tidak hanya berjalan sebagai program digital semu, tetapi benar-benar menjadi tulang punggung inovasi dalam pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kulon Progo.

Sosialisasi

Menurut Erawati et al. (2021) Sosialisasi merupakan aspek komunikasi kebijakan yang memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap program. Banyak ahli komunikasi publik berpendapat bahwa keberhasilan sebuah program inovatif tidak hanya bergantung pada keunggulan teknologinya, tetapi juga pada seberapa efektif informasi disampaikan kepada khalayak sasaran.

Tabel 3. Rekomendasi Sosialisasi Program BumilKu

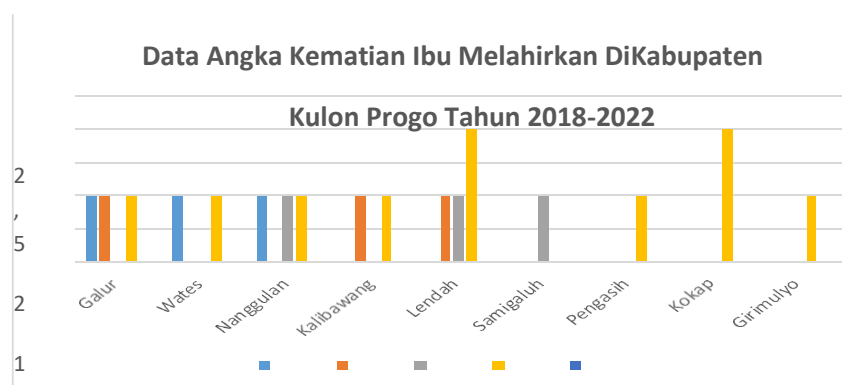
Aspek Sosialisasi	Temuan Lapangan
Sasaran utama sosialisasi	Baru menysasar petugas Dinas dan Bidan, belum langsung ke ibu hamil
Media komunikasi yang digunakan	Belum ada media promosi interaktif bersifat verbal dan manual
Frekuensi dan rutinitas	Rutin dilakukan sejak awal program untuk internal tenaga kesehatan
Dampak awal	Ada penurunan AKI & AKB meski belum signifikan menurut evaluasi lapangan
Tantangan	Literasi digital masyarakat rendah, belum ada fitur langsung untuk ibu hamil

Dalam hal ini, rendahnya intensitas penyuluhan dan minimnya materi promosi menyebabkan sebagian langsung melalui penyuluhan tatap muka, *leaflet*, video tutorial, atau kolaborasi dengan kader kesehatan desa dapat menjadi strategi alternatif untuk meningkatkan kesadaran. Pelibatan tokoh masyarakat dan institusi nonformal juga menjadi pendekatan strategis dalam memperluas jangkauan sosialisasi program.

Dampak

Dampak aplikasi *BumilKu* secara umum telah terlihat dari peningkatan keteraturan administrasi dan kecepatan sistem rujukan. Meskipun penurunan angka kematian ibu dan anak belum signifikan, program ini dinilai telah menciptakan tata kelola data yang lebih baik. Menurut Scriven (1995) menyatakan bahwa dampak kebijakan tidak hanya dilihat dari jumlah pengguna, tetapi juga outcome jangka panjang seperti perubahan perilaku ibu hamil, peningkatan cakupan antenatal care, serta penurunan angka kematian ibu.

Dampak dari program BumilKu dapat dianalisis berdasarkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kulon Progo selama lima tahun terakhir. Meskipun program ini belum berjalan secara penuh sejak awal periode, namun kehadirannya telah memberikan kontribusi dalam peningkatan sistem deteksi risiko, pencatatan data kehamilan, serta percepatan proses rujukan.



Grafik 1.

Sumber: DinasKesehatanKab.KulonProgo2023

Data dari Dinas Kesehatan diatas menunjukkan bahwa angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan total 10 kasus, sementara pada tahun 2022 tidak tercatat satu pun kasus kematian ibu. Ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan yang bisa dikaitkan dengan penggunaan sistem digital seperti BumilKu, terutama dalam hal penanganan kehamilan risiko tinggi. Aplikasi *BumilKu* bukan hanya alat administratif, tetapi juga bisa berkembang menjadi sarana edukatif yang mendorong perubahan perilaku ibu hamil secara mandiri. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh seperti ini penting dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika kebutuhan di lapangan, serta meningkatkan nilai keberlanjutan dari program berbasis teknologi informasi ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Program BumilKu merupakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang cukup efektif dalam mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Kulon Progo. Aplikasi ini membantu tenaga kesehatan dalam memantau kondisi ibu hamil secara lebih sistematis dan memudahkan proses rujukan. Namun demikian, efektivitas program masih dibatasi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang belum merata, sarana prasarana yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat sebagai pengguna akhir.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain:

- 1) Penambahan fitur edukatif dan interaktif dalam aplikasi BumilKu agar dapat diakses langsung oleh ibu hamil.
- 2) Pelatihan rutin dan distribusi SDM operator yang merata ke seluruh Puskesmas
- 3) Perluasan kegiatan sosialisasi melalui media sosial dan kader kesehatan, serta
- 4) Pengembangan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program berbasis teknologi ini.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup observasi yang masih terbatas pada wilayah tertentu di Kulon Progo dan keterbatasan jumlah informan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lokasi serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif agar dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. A., & Barokah, L. (2018). Strategi promosi kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu. *Jurnal Kebidanan*, 6(2), 88–94.
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). Routledge.
- Fitriani, H., Putri, L. A., & Wahyuni, N. (2019). Peran teknologi dalam monitoring ibu hamil berisiko. *Midwifery Journal*, 4(1), 55–64.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kurniawan, R., & Eko, M. (2020). Implementasi aplikasi BumilKu dalam pelayanan kesehatan ibu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 101–109.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Musopadijaya, D. (2003). *E-Government di Indonesia: Konsep, strategi dan implementasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Narayan, D. (2013). *Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives*. World Bank Publications.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurcholis, H. (2011). *Teori dan praktik kebijakan publik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Bupati Kulon Progo No. 87 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- Rahayu, S., & Santoso, H. B. (2020). Evaluasi adopsi sistem informasi kesehatan berbasis web dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 12–22.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Scriven, M. (1995). The logic of evaluation and evaluation practice. *Evaluation*, 1(1), 7–19. <https://doi.org/10.1177/135638909500100103>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliana, S. (2021). Pelatihan digitalisasi pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas SDM puskesmas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 3(2), 88–95.